

## MENIMBANG RAPBN 2021 PASCA PANDEMI

Oleh Tim Riset Stabilitas LPPI

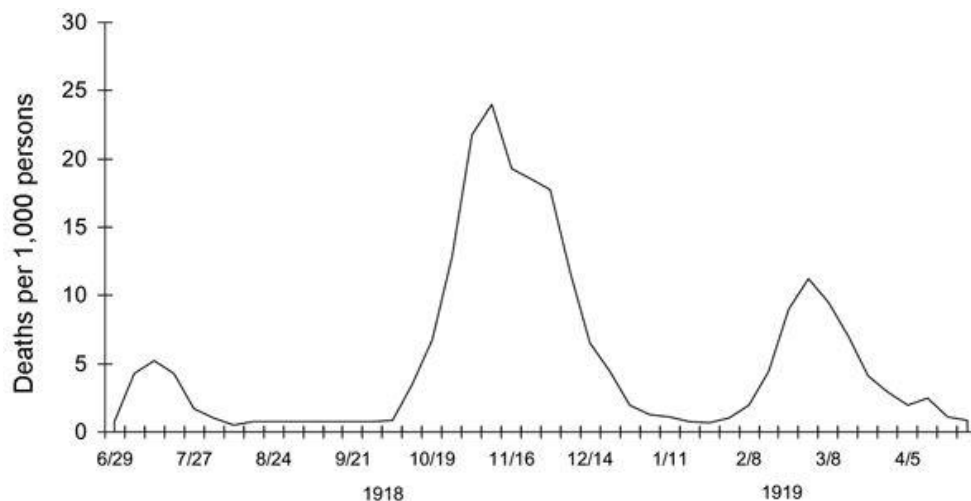
Pada Agustus 2020 kemarin, pemerintah mengajukan rancangan anggaran negara 2021 sebagai instrumen fiskal dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional di tahun depan. Tema besar yang diusung dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tersebut adalah kebijakan pembangunan pasca pandemi Covid-19. Meski begitu, frasa pembangunan pasca pandemi Covid-19 belum tepat digunakan karena belum diketahui ujung dari pandemi ini. Masih ada probabilitas untuk terjadinya gelombang kedua dan ketiga di tahun depan.

**Anggaran negara yang dirancang untuk digunakan tahun depan dinilai belum memperhitungkan aspek kemungkinan terburuk dari berlangsungnya pandemi ini.**

Kenapa begitu? Dahulu pada awal abad ke-20 terjadi flu Spanyol. Pandemi yang diperkirakan telah menginfeksi 30 persen populasi dunia pada waktu itu telah menewaskan 50 juta orang. Angka ini sama dengan sekitar 10 persen dari jumlah penderitanya sebesar 500 juta orang. Fakta tersebut menjadikan flu Spanyol sebagai motherofpandemic dan didapuk sebagai pandemi terburuk sepanjang sejarah manusia.

Buruknya flu Spanyol disebabkan adanya gelombang wabah yang terjadi hingga 3 kali. Ketiga gelombang tersebut terjadi pada Juni-Juli 1918 (gelombang pertama), Oktober – Desember 1918 dan Februari – April 1919. Gelombang kedua merupakan gelombang terdahsyat dengan puncak jumlah kematian mencapai 25 kematian per 1000 penduduk.

**Gambar 1**  
**Gelombang Flu Spanyol Tahun 1918 – 1919**



Sumber : <https://history.blog.gov.uk/>

Berkaca dari wabah Flu Spanyol yang terjadi dalam tiga gelombang, maka sebaiknya mitigasi wabah covid-19 tidak menggunakan skenario dasar satu gelombang. Selain itu, kurva infeksi covid-19 yang

## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

masih terus meningkat di Indonesia dan belum terlihat tanda-tanda puncak dan bagian landainya, menjadi penguat untuk tidak fokus pada pasca pandemi Covid-19 di tahun fiskal 2021.

### Fokus Pasca Pandemi

Narasi RAPBN 2021 dibangun dengan informasi bahwa ia didesain sebagai instrumen pasca pandemi. Hal ini setidaknya terlihat dari beberapa hal pertama, tema yang diusung. RAPBN 2021 bertajuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Lebih lanjut, terdapat empat narasi RAPBN 2021.

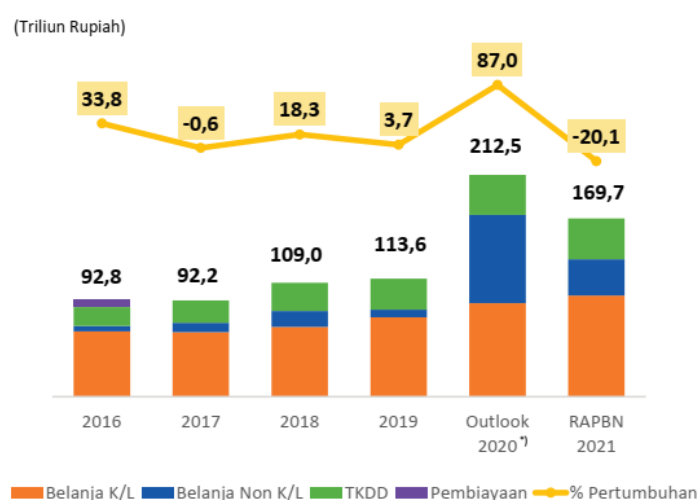
Pertama, perekonomian global dan domestik di tahun 2021 diproyeksikan membaik. Proyeksi ini didasari pada harapan telah ditemukannya vaksin Covid-19. Catatannya, apabila vaksin belum ditemukan dan ada gelombang lanjutan pandemi, maka pemulihan ekonomi akan masih jauh panggang dari api.

Kemudian narasi kedua, pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan countercyclical di tahun 2021 melalui RAPBN yang ekspansif-konsolidatif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat reformasi struktural.

Kemudian, narasi ketiga adalah fokus RAPBN 2021 berikutnya adalah ditujukan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dan keempat prioritas pembangunan nasional akan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata.

Meskipun bidang kesehatan masuk sebagai prioritas pembangunan nasional, namun anggaran kesehatan pada RAPBN 2021 justru menurun. Anggaran kesehatan pada RAPBN 2021 sebesar 169,7 triliun rupiah atau turun 20,1 persen jika dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp212,5 triliun. Lebih lanjut, pada APBN 2020, terdapat angka Rp87,55 triliun yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dibidang kesehatan. Angkanya turun menjadi Rp25,4 triliun di RAPBN tahun 2021. Penurunan angka belanja kesehatan ini menunjukkan ada optimisme terhadap berakhirnya gelombang pandemi dan ditemukannya vaksinasi secara massal.

**Gambar 2**  
**Belanja Kesehatan di RAPBN 2021**



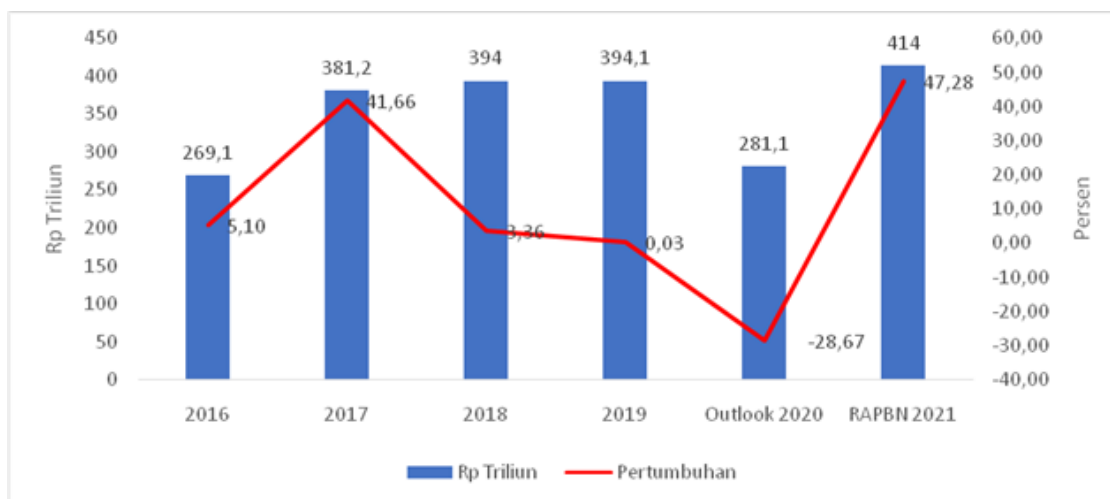
Sumber : RAPBN 2021 – Kementerian Keuangan

## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Belanja infrastruktur naik drastis. Pada RAPBN 2021, ditargetkan belanja infrastruktur mencapai Rp414 triliun atau meningkat 47 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp281,1 triliun. Lebih lanjut, angka RAPBN 2021 apabila dibandingkan dengan APBN 2019 meningkat 10,28 persen. Pada masa pandemi atau tahun fiskal 2020, belanja infrastruktur berkontraksi sebesar 28,67 persen atau menjadi Rp218,1 triliun. Kenaikan belanja infrastruktur ini bisa menandakan bahwa agenda pembangunan infrastruktur Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua berada pada posisi track normal seperti tanpa pandemi.

Lebih lanjut, fokus pembangunan infrastruktur RAPBN 2020 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi Covid 19. Hal itu dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas dengan arahan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata. Kemudian, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhandasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dan penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

**Gambar 3**  
**Belanja Infrastruktur APBN/ RAPBN 2016 – 2021**



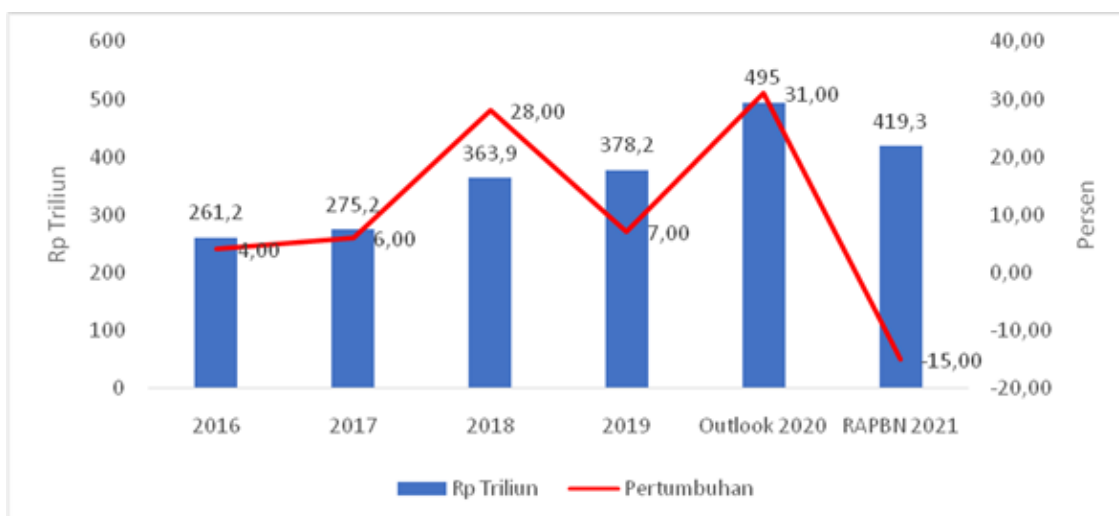
Sumber : RAPBN 2021 – Kementerian Keuangan

Belanja RAPBN 2021 di tengah ancaman pandemi, harus ditekankan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui belanja perlindungan sosial. Pada APBN 2020, belanja perlindungan sosial naik 31 persen menjadi Rp495 triliun dibandingkan dengan APBN 2019 sebesar Rp378.2 triliun. Pada RAPBN 2021, masih di tengah ketidakpastian ekonomi, turun 15 persen dibandingkan APBN 2020, menjadi Rp419,3 triliun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2019, angkanya meningkat 10,8 persen.

Dalam RAPBN 2021, fokus belanja perlindungan sosial ditujukan untuk pertama, melanjutkan Perlinsos dalam rangka akselerasi pemulihan. Program perlindungan sosial antara lain meliputi Kartu Sembako, PKH, BansosTunai dan Kartu Pra kerja. Kemudian kedua, mendorong program perlinsos yang komprehensif berbasis siklus hidup danantisipasi agingpopulation(reformasiperlindungan sosial). Ketiga, Integrasi Program Bansos dengan subsidienergi secara bertahap dan berhati-hati. Serta keempat Penyempurnaan DTKS dan perbaikanmekanisme penyaluran program perlinsos,serta penguatan monitoring dan evaluasi.



**Gambar 4**  
**Belanja Kesejahteraan Sosial**



Sumber : RABPN 2021 – Kementerian Keuangan

Secara lebih terinci, program perlindungan sosial dalam RABPN 2021, setidaknya terdiri dari 5 program yakni program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Tunai, Kartu Indonesia Pintar untuk siswa, Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa. Dari kelima program prioritas tersebut, program bantuan pangan menjadi program yang mengalami penyusutan target. Pada tahun 2020, penerima manfaat bantuan sosial pangan tunai mencapai 20 juta orang. Angka ini menurun menjadi 18,8 juta orang di tahun 2021.

**Tabel 1**  
**Program/ Target Belanja Perlindungan Sosial**

Program/Target	2020	2021	Satuan
Cakupan Penerima Program Keluarga Harapan	10 juta	10 juta	Penerima Manfaat
Penerima Bantuan Pangan Tunai	20 juta	18,8 juta	Penerima Manfaat
Bantuan Kartu Indonesia Pintar	20,1 juta	20,1 juta	Siswa
Peserta JKN	96,8 juta	96,8 juta	Penduduk
Bansos Tunai	9 juta	10 juta	Penerima Manfaat
Kartu Indonesia Pintar	1 juta	1,1 juta	Mahasiswa

Sumber : RABPN 2021 – Kementerian Keuangan

Penurunan angka penerima manfaat penerima bantuan pangan tunai menandakan bahwa optimisme fiskal pemerintah 2021 sudah berada pada track normalisasi pasca pandemi. Selain itu juga terlihat dari meningkatnya jumlah penerima bantuan sosial tunai dari 9 juta di tahun 2020 menjadi 10 juta di 2021.

Bantuan sosial tunai menjadi kurang efektif di era pandemi karena belanja tidak bisa “diarahkan” dalam menstimulus aggregate demand dengan menstimulus sektor tertentu. Di masa pandemi, tetap menjaga sektor pertanian peternakan dan perikanan tetap bergeliat adalah keniscayaan. Hal ini penting karena ketiga sektor ini merupakan benteng terakhir dalam perekonomian. Apabila sektor primer kolaps, dalam artian tidak memproduksi atau ada gangguan produksi maka perekonomian akan mengarah pada inflasi tinggi. Bagaimanapun juga, sektor primer adalah sektor basic yang ada permintaannya, baik krisis



maupun tidak krisis. Berbeda dengan kebutuhan sekunder apalagi tersier dimana konsumen masih bisa hidup meski tidak memiliki kemampuan untuk mengonsumsinya.

### Skenario Gelombang 2

Sebelum disahkan menjadi UU APBN 2021 pada Oktober 2021, RAPBN 2021 perlu mempertimbangkan kembali rally panjang dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan minimal 2 hal : puncak pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum terlihat kurva puncaknya dan vaksin yang masih dalam tahap uji klinis. Adanya skenario menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 penting agar dampak ekonomi dan dampak kesehatannya tidak besar.

Selanjutnya, kebijakan fiskal 2021 perlu mempertimbangkan uji klinis vaksin yang masih masuk tahap 2 (vaksin Sinovac) yang masih berjalan per Minggu ke dua September 2020. Diperlukan satu tahap uji klinis lagi agar vaksin Covid-19 dinyatakan aman dan bisa digunakan untuk vaksinasi massal Covid-19. Kebutuhan skenario apabila uji klinis tahap 3 gagal sangat dibutuhkan.

Meskipun belum terlihat secara eksplisit adanya skenario untuk mengantisipasi pandemi gelombang kedua dan ketidakberhasilan uji klinis vaksin Covid-19 yang sekarang masih berjalan, setidaknya ada alokasi anggaran besar yang bisa direalokasikan untuk menangani skenario buruk tersebut. Anggaran tersebut bisa berasal dari belanja infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah di 2021. Fleksibilitas ini setidaknya ada ditangan Pemerintah dengan Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Semoga puncak pandemi Covid-19 bisa segera berlalu, gelombang pandemi covid-19 kedua tidak terjadi dan uji klinis vaksin tahap 3 berjalan lancar. Alhasil, diharapkan tidak perlu ada perubahan mendadak dalam APBN 2021.

#### Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Corporate Secretary (DCSC)

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: [corsec@lppi.or.id](mailto:corsec@lppi.or.id)

Website : [www.lppi.or.id](http://www.lppi.or.id)

***Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.***

